

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil dari Analisis Laporan Keuangan Dana Desa di Kampung Sri Sawahan Kecamatan Punggur, maka disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan perhitungan menggunakan rasio kemandirian daerah, kinerja keuangan Pemerintah Kampung Sri Sawahan Kecamatan Punggur pada tahun 2020 dan 2021 termasuk dalam kategori sangat rendah dan termasuk ke dalam pola hubungan Instruktif, yaitu peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah.
2. Berdasarkan perhitungan menggunakan rasio efesiensi belanja daerah, kinerja keuangan Pemerintah Kampung Sri Sawahan Kecamatan Punggur pada tahun 2020 dan 2021 didapatkan hasil yaitu kurang efesiensi.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten di Seluruh Indonesia khususnya pemerintah Kecamatan Punggur dan Kabupaten Lampung Tengah. Alangkah baiknya jika pemerintah kecamatan atau kabupaten sering melakukan pembinaan atau pelatihan kepada aparatur desa tentang bagaimana cara pengelolaan administrasi, IT dan lain-lain yang diperlukan dalam kegiatan pemerintahan desa. Karena kebanyakan aparatur desa adalah orang-orang sudah cukup berumur yang pemahaman tentang administrasi dan IT yang kurang.
2. Bagi Pemerintah Desa Sri Sawahan, Kinerja keuangan Desa Sri Sawahan dilihat dari rasio kemandirian daerah dan rasio efesiensi belanja daerah masih kurang baik sehingga pemerintah Desa Sri Sawahan harus terus meningkatkan kinerja keuangannya agar setiap tahunnya dapat menjadi lebih baik lagi. Serta pemerintah Desa Sri Sawahan harus meningkatkan dan memperbaiki kinerja dalam memperhitungkan alokasi pendanaan secara cermat agar tidak menimbulkan keborosan anggaran dan kesalahan dalam penentuan prioritas pendanaan. Dan juga perlu adanya peningkatan kinerja terutama dalam penyusunan program kerja yang bertujuan untuk mendapatkan Pendapatan Asli Desa dari hasil BUMDesa.
3. Bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini atau melakukan penelitian yang sama dengan rasio yang sama pula namun di tempat yang berbeda

bisa menambahkan periode tahun anggarannya menjadi 5 tahun atau lebih agar mendapatkan gambaran kinerja yang lebih baik tentang kinerja keuangan pemerintah desa.